

BAB VI

PENUTUP

VI. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia telah secara aktif melakukan kerjasama dengan Taiwan dalam menempatkan PMI sektor formal melalui SP2T di perusahaan Taiwan pada periode tahun 2019-2022. Kerjasama yang terjalin terbukti memberi manfaat terhadap Indonesia dalam mengurangi angka pengangguran dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya sedangkan, manfaat tersebut bagi Taiwan secara politik yaitu memperlihatkan konsistensinya sebagai negara maju di mata dunia dan secara ekonomi, Taiwan memiliki kebutuhan terhadap tenaga kerja usia produktif dan keberadaan PMI di Taiwan memberikan kontribusi terhadap perekonomian Taiwan.

Selanjutnya, kerjasama dalam penempatan PMI di Taiwan juga mempertimbangkan pihak yang terlibat seperti Indonesia dan lembaga pemerintah terkait seperti BP2MI dan KDEI juga mitra kerjasama yaitu pemerintah dan industri Taiwan. Untuk itu pertimbangan pemerintah menggunakan SP2T dalam kerjasama Indonesia dan Taiwan bertujuan untuk menghindari eksploitasi PMI dan keterlibatan agensi. Prioritas pemerintah dalam menempatkan PMI sektor formal merupakan tujuan jangka panjang agar PMI dapat menempati posisi dengan jabatan yang terverifikasi. Keuntungan lainnya yaitu dengan PMI bekerja pada sektor formal tentu mendapat upah gaji sesuai standar Taiwan, memberikan remitansi terhadap negara asalnya dan terjamin keamanannya jika dibandingkan dengan sektor informal. Sedangkan keuntungan jangka panjang yang diperoleh Taiwan melalui kerjasama penempatan adalah Taiwan yang didominasi oleh usia 60 tahun keatas membutuhkan tenaga kerja usia produktif untuk itu kerjasama tersebut akan memberikan keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja.

Adapun alasan migrasi PMI dalam sektor formal di Taiwan dilakukan atas ketertarikan yang didasari oleh pertimbangan gaji antara negara asal dengan negara tujuan, terbatasnya lapangan pekerjaan di negara asal dengan minimal

lulusan SMK serta aksesnya di masyarakat. Namun penulis melihat bahwa walaupun Indonesia memiliki jumlah lulusan SMK yang banyak dan meningkat setiap tahunnya serta banyaknya pendaftar yang melamar menjadi PMI formal dengan SP2T, kandidat yang terpilih tetap diputuskan oleh perusahaan pemberi kerja sehingga yang berhasil lolos seleksi hanya sejumlah kecil saja. Untuk itu pentingnya dicantumkan dalam MoU terkait perekrutan, penempatan dan perlindungan PMI mengenai pihak yang memiliki wewenang dalam memutuskan jumlah kuota untuk ditempatkan di perusahaan Taiwan.

Faktor yang menyebabkan perusahaan Taiwan tidak menerima kandidat yang lolos dalam jumlah yang besar dikarenakan sesuai dengan prosedur penempatan PMI skema SP2T khususnya pada sektor manufaktur jabatan operator adalah perusahaan Taiwan dibebankan untuk menanggung biaya penempatan yang dikeluarkan oleh PMI sebelum dan selama bekerja. Biaya tersebut ditanggung oleh perusahaan Taiwan sejak pra penempatan, masa penempatan dan pasca penempatan. Sehingga sebagai upaya dari pemerintah melalui kerjasama antara BP2MI dengan KDEI untuk mengembangkan skema SP2T dan memperluas kerjasama dengan mitra Industri Taiwan lainnya agar semakin banyak PMI yang lolos seleksi di berbagai bidang industri dan jabatan yang terverifikasi.

VI.2 Saran

VI.2.1 Saran Praktis

Setelah melakukan penelitian ini, penulis memiliki saran yang dapat diberikan kepada para pemangku kepentingan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat sebagai referensi untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kedepannya terkait proses penempatan dan pengembangan program yang digunakan dalam penempatan PMI sektor formal antara lain sebagai berikut. Pertama, Perwakilan Indonesia di Taiwan yaitu Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) dan BP2MI semestinya memiliki peranan yang penting dan mampu menggantikan lembaga swasta sebagai pelaksana penempatan PMI di Taiwan khususnya pada PMI sektor formal.

Kedua, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memperluas jangkauan kerjasama dengan berbagai pihak terkait terutama dengan industri di Taiwan untuk memperkenalkan skema SP2T agar lebih banyak lagi perusahaan yang bergabung sehingga semakin besar peluang pekerja migran Indonesia menempati posisi di berbagai bidang industri dan jabatan yang terverifikasi. Di samping itu juga, pemerintah diharapkan dapat melakukan berbagai upaya dan strategi dalam memprioritaskan PMI sektor formal daripada informal. Pemerintah Indonesia sebagai negara pengirim perlu melakukan diskusi dan negosiasi dengan pemerintah dan industri Taiwan sebagai negara penerima agar dalam MoU mengenai perekrutan, penempatan dan perlindungan PMI dicantumkan secara tertulis pihak yang berwenang dalam memutuskan calon PMI yang lolos seleksi dan berangkat ke Taiwan. Ketiga, melalui program SP2T diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi negara lain untuk merancang program penempatan PMI yang tidak hanya memberikan perlindungan terhadap PMI tetapi juga membantu PMI mengatasi masalah terkait biaya penempatan di negara tujuan

VI.2.2 Saran Teoritis

Saran teoritis yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini yaitu melakukan analisis dengan menggunakan teori lainnya selain yang digunakan penulis yaitu kerjasama internasional dan migrasi internasional dalam kerjasama penempatan PMI antara Indonesia dan Taiwan melalui skema SP2T.

Saran penulis untuk penelitian berikutnya yaitu dapat menganalisis kerjasama antara Indonesia dan Taiwan dengan sudut pandang lain dalam penempatan PMI sektor formal, hal ini dikarenakan prioritas negara dalam menempatkan PMI sektor formal merupakan wujud dari pembuktian Indonesia ketika terdapat warga negaranya yang bekerja di luar negeri ditempatkan pada pekerjaan yang menggunakan *middle skill* dan bekerja secara professional.